

STUDI TENTANG PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA MUARA BENGKAL ULU KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Rahmat Al Fajar¹ Chatas Teguh Prakoso², Dini Zulfiani³

Abstrak

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat Perencanaan Program Pembangunan Desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu, tahap-tahap perencanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, anggaran perencanaan pembangunan desa serta faktor penghambat Perencanaan Program Pembangunan Desa di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa perencanaan program pembangunan desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dari segi tahap-tahap perencanaan pembangunan desa sudah berjalan cukup baik. Tahap-tahap perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Begitupun dalam segi penganggaran yang sudah berjalan baik. Penganggaran perencanaan pembangunan desa di Desa Muara Bengkal Ulu sudah sesuai dengan aturan yang ada seperti transparansi anggaran. Sedangkan dari segi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa belum baik. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di desa Muara Bengkal Ulu rendah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Kata Kunci : Perencanaan, Pembangunan, Partisipasi

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Desa Muara Bengkal Ulu merupakan salah satu dari tujuh desa di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, selain desa Muara Bengkal Iilir, Benua Baru, Batu Balai, Senambah, Mulupan dan Ngayau. Desa Muara Bengkal Ulu sudah berdiri sejak masa penjajahan belanda pada tahun 1910an. Desa Muara Bengkal sebelumnya ialah masuk ke dalam Kecamatan Muara Ancalong, pada tahun 1965 terjadi pemekaran sehingga berdirinya Kecamatan Muara Bengkal. Kecamatan Muara Ancalong yang merupakan induk dari Kecamatan Muara Bengkal merupakan kecamatan tertua yang ada di Kutai.

Dilihat dari perkembangan sejak awal berdirinya Desa Muara Bengkal Ulu. Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Muara Bengkal ialah pembangunan dasar yang harus dilakukan di dalam sebuah desa demi kesejahteraan rakyat seperti pembuatan jalan sebagai akses masyarakat dalam berpergian dalam kehidupan sehari-hari, pendirian gedung sekolah sebagai kebutuhan utama masyarakat dalam pendidikan, pendirian tempat kesehatan sebagai jaminan kesehatan masyarakat, pembangunan masjid sebagai tempat beribadah masyarakat dan sebagainya. Semua merupakan hal mendasar yang harus dibutuhkan oleh masyarakat. Harapannya adalah pembangunan yang dilakukan kedepan dapat berinovasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa seperti pembangunan tempat wisata.

Desa Muara Bengkal Ulu juga belum bisa dikatakan sebagai desa mandiri karena hanya mengandalkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam proses pembangunannya. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berjalan. Padahal BUMDES memiliki peran penting disebuah desa seperti Meningkatkan Perekonomian Desa, Meningkatkan Pendapatan asli Desa, Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum bisa memaksimalkan anggaran yang ada untuk sebuah pembangunan terutama untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) tahun 2018 di Desa Muara Bengkal Ulu diketahui yang hadir adalah 47 orang yang terdiri dari staf Desa, BPD, ketua RT seluruh desa, LPM, dan dari pihak Pemerintah Kecamatan.

Dari hasil Musrenbang diatas terdapat 112 usulan dari peserta yang hadir. Usulan-usulan tersebut di bagi menjadi 3 bidang yaitu usulan dibidang Sarana Prasarana dengan 74 usulan, bidang Ekonomi 29 usulan dan Sosial Budaya dan Pemerintahan 9 usulan. Dari keseluruhan usulan tersebut lalu dikerucutkan lagi menjadi Usulan Musrenbang Prioritas yang terdiri dari:

1. Bidang Sarana dan Prasarana:
 - a. Pembukaan dan Penigkatan Badan Jalan (di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah).
 - b. Peningkatan Jalan H. Abd Haib.
 - c. Peningkatan jalan usaha tani Gang. Masjid At Taqwa.

- d. Rabat Beton Jalan Akasia.
2. Bidang Ekonomi : -
3. Bidang Sosial Dan Pemerintahan:
 - a. Pembersihan Danau Gelumbang.
 - b. Pengadaan Ambulance Desa.

Jika dilihat dari gambaran di atas pemerintah desa Muara Bengkal Ulu lebih cenderung mengutamakan pembangunan fisik dan pengadaan barang di dalam perencanaan pembangunan. Padahal jika kita lihat pembangunan yang ideal adalah yang mencakup pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik. Contoh pembangunan fisik adalah seperti pembuatan jalan, jembatan, kantor dll. Sedangkan pembangunan nonfisik ialah pembangunan yang tidak nampak seperti pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pelatihan, Pengembangan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Selain itu, jika dilihat dari data kehadiran Musrenbang, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan juga rendah, sehingga dikhawatirkan hasil perencanaan pembangunan tidak efektif dan efisien atau tidak tepat sasaran karena tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat desa yang dinilai lebih mengetahui permasalahan dan kebutuhan desa.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi tentang Perencanaan Program Pembangunan Desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur”.

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian dilatar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perencanaan Program Pembangunan Desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur?
2. Bagaimana faktor penghambat perencanaan program pembangunan desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur?

Kerangka Dasar Teori

Administrasi

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). The liang gie (dalam pasalong, 2011:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pembangunan

Pembangunan menurut Siagian (2009:4) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (nation-building). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari defenisi pembangunan merupakan upaya yang

secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa. Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto, 2006:4).

Administrasi Pembangunan

Mostopadidjaya dalam Afiffudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Dari pengertian administrasi pembangunan di atas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Pembangunan Desa

Bintoro Tjokroamidjojo (P.Ar bain Padilah dalam jurnal ilmu pemerintahan, 2013:525), mengatakan bahwa pembangunan adalah proses atau usaha-usaha perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya Efendi (P. Arbain Padilah dalam jurnal ilmu pemerintahan, 2013:526) pembangunan mempunyai arti yaitu suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasilnya merata serta berkeadilan.

Pembangunan desa ditinjau dari sudut geografis, adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan dari unsur-unsur fisiografis sosial, politik, ekonomi, kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu pasal 1 ayat 5 menegaskan bahwa yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Siagian (2003:108), Pembangunan Desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar dan terus menerus melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat desa.

Dasar-Dasar Pembangunan Desa

Menurut Nurman (2015:235) Pembangunan desa telah menjadi dua istilah yang sering dicampuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Pembangunan masyarakat desa (community development) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (rural development) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.

Otonomi Desa

Menurut Norman (2015:243) pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan dan pembangunan, sebab wilayah negara itu pada umumnya terdiri dari berbagai satuan daerah yang masing-masing memiliki sifat khusus seperti keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat istiadat, kehidupan ekonomi, dialek bahasa, tingkat pendidikan dan lainnya.

Otonomi desa dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1999 sebagai daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administrative kabupaten dan kecamatan. Penyelenggara pemerintah desa dijelaskan merupakan unsur pelaksana administrative kabupaten dan kecamatan. Penyelenggara pemerintah desa dijelaskan merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada semangat good governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Norman (2015:260) Pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya.

Konsep Perencanaan

Menurut Alexander (2005:27) Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diurai beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang di rencanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan di masa depan (untuk masa depan). Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Adisasmita (34:2006) Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang di kerjakan di dalam masyarakat lokal.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek di laksanakan

Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional merupakan tahapan memberi batasan pengertian suatu istilah yang di perlukan dalam penelitian. Berdasarkan judul penelitian yang telah di ambil maka penulis dapat memberi kesimpulan dari variabel-variabel yang ada. Maka dengan demikian variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

Perencanaan Program Pembangunan Desa adalah tahapan awal manajemen dalam Administrasi Pembangunan dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat demi terwujudnya suatu pembangunan yang tepat, tidak hanya berupa pembangunan fisik namun juga pembangunan non fisik di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Berpedoman pada jenis penelitian tersebut, dengan maksud untuk menggambarkan hasil gejala-gejala yang dilihat serta amati.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Program Pembangunan Desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, dengan subfokus:
 - a. Tahap-tahap Perencanaan Program Pembangunan Desa
 - b. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program Pembangunan Desa

c. Penganggaran Perencanaan Program Pembangunan Desa

2. Faktor penghambat perencanaan program pembangunan desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di Desa Muara Bengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal Ulu, Kabupaten Kutai Timur.

Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer: Peneliti peroleh dari narasumber atau informan dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung dan dipandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti.
2. Data Sekunder : Peneliti peroleh melalui sumber informan, yakni :
 - a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, laporan hasil evaluasi yang ada di desa Muara Bengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.
 - b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penentuan penunjukan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yakni:

Menurut Sugiyono (2009:85) bahwa purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu yakni orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.

Berdasarkan hal tersebut maka yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri atas key informan (informasi kunci) yaitu Kepala Desa Muara Bengkal Ulu.

Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti Kepustakaan (Library Research), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam pengumpulan data, dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi.
2. Penelitian Lapangan (Field Word Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:
 - a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data melalui suatu pengamatan, dengan disertai catatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sarana.
 - b. Wawancara mendalam yaitu wawancara dengan beberapa key informan untuk menggali data dan informasi mengenai penelitian.
 - c. Penelitian dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data dari dokumen/arsip yang terdapat pada lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Adapun gambaran model interaktif dalam analisis data kualitatif ini sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (Data Collection)
2. Kondensasi Data (Data Condensation)
3. Penyajian Data (Data Display)
4. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing / Verifying)

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Muara Bengkal Ulu merupakan salah satu dari 7 desa di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Muara Bengkal Ulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 2095 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, 1090 merupakan berjenis kelamin laki-laki dan 995 merupakan berjenis kelamin perempuan..

Perencanaan Program Pembangunan Desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

Tahap-tahap Perencanaan Program Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat tahapan-tahapan perencanaan program pembangunan desa di Desa Muara Bengkal Ulu kurang diketahui oleh mereka. Ini terbukti dengan tidak pernahnya mereka mengikuti seluruh tahapan-tahapan perencanaan pembangunan desa. Ini bukan tidak beralasan, karena masyarakat tidak mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan desa. Masyarakat hanya mengetahui adanya Musrenbangdes dan adanya pelaksanaan pembangunan. Tanpa mengetahui proses yang terjadi di dalamnya.

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79 bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJM Desa maupun RKP Desa, keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang merupakan satu-satunya dokumen perencanaan dan menjadi dasar pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap-tahapan perencanaan pembangunan desa di Desa Muara Bengkal Ulu dilaksanakan sesuai dengan pembangunan desa yang didapat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa seperti tabel di atas.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat yang ada, di luar pekerjaannya. Partisipasi masyarakat diperlukan pada suatu program pembangunan karena keberhasilan program berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur memiliki 2 bentuk partisipasi, yaitu lembaga dan perwakilan:

Partisipasi lembaga adalah keikutsertaan sebuah instansi atau organisasi yang secara keseluruhan hadir atau terlibat dalam perencanaan pembangunan desa. Sebuah instansi atau organisasi dalam hal ini akan ikut berperan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di lingkungannya. Contohnya adalah: Karang Taruna, UPTD Pendidikan, Perpustakaan dan Sekolah. Sedangkan partisipasi perwakilan adalah keikutsertaan seseorang yang dipercaya mewakili sebuah kelompok atau lingkungan masyarakat di desa. Dalam hal ini contohnya ialah Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama.

Kemudian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Muara Bengkal Ulu, masyarakat diberikan kebebasan dalam menyampaikan ide, pikiran, gagasan dan pendapat. Namun walaupun seperti itu, keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi perencanaan pembangunan di Desa Muara Bengkal Ulu masih rendah, selain dibuktikan dengan hasil wawancara di atas bahwa yang terlibat rata-rata hanya dari lembaga dan perwakilan. Serta dibuktikan dengan daftar hadir Musrenbang Desa Muara Bengkal Ulu tahun 2019. partisipasi masyarakat masih kurang yaitu dari 39 orang yang hadir sebagian besar merupakan lembaga atau perangkat desa. Padahal kuantitas dalam sebuah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat penting. Dengan harapan semakin banyak yang hadir bisa memunculkan semakin banyak ide, pikiran dan gagasan. Sedangkan apabila rendah membuat peluang ide, pikiran dan gagasan masyarakat menjadi kecil. Dengan kata lain bahwa kuantitas partisipasi masyarakat bisa melahirkan sebuah kualitas dari ide, pikiran dan gagasan.

Penganggaran Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam sebuah perencanaan pembangunan desa proses penganggaran merupakan bagian yang paling penting. Anggaran dianggap sebagai aspek utama dari sebuah pembangunan. Karena anggaran bisa berfungsi dalam banyak hal seperti alat perencanaan, pengendalian, komunikasi, motivasi dan sebagainya. Oleh karena itu maka penulis akan melakukan wawancara terkait hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan oleh penulis bahwa BPD Muara Bengkal Ulu melaksanakan rapat atau musyawarah desa yang diikuti oleh lembaga-lembaga desa Muara Bengkal Ulu. Dalam musyawarah tersebut akan

membahas mengenai penganggaran dalam pembangunan desa. Karena desa Muara Bengkal Ulu belum mempunyai PAD (Pendapatan Asli Daerah) maka anggaran yang digunakan murni berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang masing-masing diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Hal yang kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Muara Bengkal dan Pemerintah Kecamatan Muara Bengkal bahwa perencanaan pembangunan desa yang dinilai mempunyai skala yang lebih besar atau merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, maka akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan yang diikuti oleh seluruh desa di Kecamatan Muara Bengkal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran Desa Muara Bengkal Ulu didapat dari 2 sumber, yaitu dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Sedangkan dari sumber-sumber lainnya tidak ada, padahal sumber keuangan desa bisa didapatkan dari beberapa sumber seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), swadaya dan partisipasi, gotong rotong yang bisa menjadi Pendapat Asli Desa (PAD), pajak daerah dan retribusi, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bisa dikatakan bahwa Desa Muara Bengkal Ulu masih tergantung/mengandalkan anggaran yang diperoleh dari pemerintah daerah dan pusat, Desa Muara Bengkal juga belum bisa dikatakan Desa Mandiri yang bisa berjalan dengan mengandalkan Pendapatan Asli Desa yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Faktor Penghambat dalam Perencanaan Program Pembangunan Desa

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis tentang hambatan-hambatan dalam perencanaan program pembangunan desa ialah tentang anggaran. Karena pihak Desa Muara Bengkal Ulu belum bisa mengetahui jumlah anggaran yang keluar sebelum ada kebijakan dari pemerintah daerah padahal proses perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan dan mempunyai hasil.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dampak bagi masyarakat tidak dirasakan. Masyarakat beranggapan bahwa semua telah dilaksanakan oleh Ketua RT. Adapun yang mempunyai dampak ialah masyarakat yang mempunyai sebuah usulan namun tidak disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Muara Bengkal Ulu meliputi faktor kebijakan daerah, konflik kepentingan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa.

Hambatan faktor aturan adalah pemerintah desa harus menunggu kebijakan daerah atau pusat untuk mengeluarkan anggaran. Padahal setiap desa sudah melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan desa yang telah tersusun dengan menyesuaikan waktu berdasarkan dari aturan atau pedoman yang ada. Dengan terlambatnya anggaran keluar maka akan menghambat pembangunan desa yang bisa menyebabkan pembangunan yang tidak tepat waktu.

Selanjutnya faktor kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa. Selain kesadaran diri masyarakat, faktor kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa juga menjadi faktor penghambat. Kurangnya kesadaran diri dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa bukan tanpa alasan. Harapan agar pemerintah desa untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat supaya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa pun tumbuh dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan desa Muara Bengkal Ulu.

Pembahasan

Perencanaan Program Pembangunan Desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

Tahap-tahap dalam Perencanaan Program Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa sumber, tahap-tahap perencanaan pembangunan desa di Desa Muara Bengkal Ulu telah dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa aspek yang belum diperhatikan karena pemerintah desa hanya melaksanakan tahapan-tahapan yang bersifat resmi berdasarkan dari aturan-aturan yang sudah ada. Sedangkan dalam tahapan-tahapan perencanaan perlu juga dilaksanakan kegiatan yang bersifat inovatif seperti proses penyelidikan di mana pemerintah desa bisa langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Dalam hal ini bisa dikatakan pemerintah desa yang “menjemput bola” atau proaktif untuk menyelesaikan masalah yang ingin dicari. Proses penyelidikan ini juga berguna untuk mengumpulkan data yang ada di tengah masyarakat sehingga bisa dilanjutkan dengan perumusan tujuan yang jelas dengan harapan semua kegiatan pembangunan sudah tepat dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga tahapan-tahapan perencanaan pembangunan desa ini satu kesinambungan atau bersifat kompleks, sehingga apabila ada proses tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan akan mempengaruhi hasil dari perencanaan itu sendiri.

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tahapan-tahapan perencanaan pembangunan desa di Desa Muara Bengkal Ulu perlu diperbaiki. Apa yang telah dilaksanakan oleh Desa Muara Bengkal Ulu sudah tepat namun akan lebih baik apabila ada inovasi yang dilakukan demi perbaikan dari perencanaan pembangunan desa itu sendiri. Dengan harapan hasil dari perencanaan pembangunan desa bisa lebih baik dari sebelumnya atau tidak monoton setiap tahunnya melaksanakan tahapan-tahapan yang sama. Selain itu juga harus pemerintah desa juga harus menetapkan model perencanaan yang sama dalam pelaksanaan pembangunannya, agar tujuan pembangunan selaras sehingga menghasilkan pembangunan yang lebih baik dan terarah.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa sumber bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

desa di Desa Muara bengkal Ulu tidak diikuti oleh masyarakat secara luas. Karena yang berpartisipasi hanyalah tokoh masyarakat yang diundang oleh pemerintah desa. Tokoh masyarakat dalam hal ini ialah seseorang yang dipandang berpengaruh atau dihormati di desa contohnya seperti ulama, ketua adat dll. Menurut pemerintah desa, mereka telah memberitahukan setiap RT untuk melaksanakan rapat atau musyawarah bersama masyarakat di masing-masing lingkungannya untuk menggali gagasan dalam rangka perencanaan pembangunan desa. Sehingga dalam hal ini masyarakat secara umum sudah diwakilkan oleh ketua RT di setiap lingkungannya. Namun demikian pemerintah desa juga turut mengundang pimpinan setiap lembaga/instansi di lingkungan desa Muara Bengkal Ulu seperti UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Bengkal, Kepala sekolah SD-SMA/Sederajat dll.

Anggaran Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya tentang APBDDes kepada perangkat desa. Tujuan utama dari APBDDes adalah pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian wewenang dalam proses penyusunan desa kepada perangkat desa yaitu sekretaris desa dan bendahara desa.

Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa penganggaran perencanaan pembangunan desa di Desa Muara Bengkal sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan dalam pelaksanaannya sudah mengikuti pedoman yang ada. Walaupun seperti itu penganggaran di Desa Muara Bengkal Ulu seharusnya bisa lebih baik dikarenakan tidak adanya Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dihasilkan dari pelaksanaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Padahal dalam apabila BUMDES bisa berjalan dan mendapatkan hasil

Faktor Penghambat Perencanaan Program Pembangunan Desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur Kebijakan Daerah.

Dalam proses penganggaran pemerintah desa harus menunggu kebijakan dari pemerintah daerah. Padahal dalam sebuah perencanaan pembangunan desa aspek yang dinilai paling penting adalah anggaran. Anggaran sebenarnya bisa menjadi aspek pendukung dalam sebuah pembangunan desa namun akan menjadi penghambat apabila anggaran yang ada keluar tidak tepat waktu atau terlambat. Karena hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di sebuah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan setelah dilakukannya pengamatan penulis menemukan bahwa penganggaran dalam sebuah perencanaan pembangunan desa akan terganggu apabila harus menunggu keluarnya anggaran. Karena pemerintah desa tidak bisa memprediksi kapan tepatnya waktu anggaran akan keluar. Sedangkan proses perencanaan sudah berjalan dari awal sampai dengan sebelum terhenti diproses penganggaran. Apabila hal ini terjadi maka pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak selain menunggu kepastian keluarnya anggaran. Sedangkan hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang bisa saja mundur dari waktu yang sudah ditentukan. Apalagi pembangunan desa yang bersifat jangka panjang yang tentu harus bisa dilaksanakan secepat mungkin agar pembangunan lanjutannya tidak terganggu.

Kurangnya Sosialisasi dan Komunikasi

Dalam sebuah perencanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dinilai penting agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan tepat sasaran. Masyarakat dinilai lebih mengetahui permasalahan yang ada karena mereka langsung menghadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan setelah dilakukannya pengamatan penulis menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat akan dikarenakan kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa. Karena dalam rangka melaksanakan pembangunan pemerintah desa tidak akan bisa melaksanakan dengan baik apabila kurangnya peran dari semua pihak termasuk masyarakat. Dalam sebuah pembangunan yang baik pemerintah desa harus bisa menggandeng semua pihak terkait untuk bersinergi dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di lapangan mengenai perencanaan program pembangunan desa di desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan Program Pembangunan Desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur
 - a. Tahap-tahap perencanaan pembangunan desa Tahapan-tahapan perencanaan pembangunan desa di desa Muara Bengkal Ulu sudah baik, semua kegiatan perencanaan sudah mengikuti prosedur yang sudah ada sehingga kegiatan yang ada berjalan dengan lancar. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang terjadi di tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh desa Muara Bengkal Ulu yaitu tidak dilaksanakannya partisipasi masyarakat secara penuh karena masih terdapat tahapan-tahapan yang tidak melibatkan masyarakat apalagi dalam tahapan penggalian gagasan.
 - b. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Muara Bengkal Ulu kurang baik. Masyarakat jarang terlibat dalam proses

perencanaan pembangunan dari tahap awal sampai akhir, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah desa. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi alasan mengapa partisipasi masyarakat kurang.

c. Anggaran Perencanaan Pembangunan Desa

Penganggaran perencanaan pembangunan desa di Desa Muara Bengkal Ulu cukup baik. Semua dilaksanakan dengan transparansi dan mengikuti prosedur yang ada. Namun terdapat beberapa kekurangan seperti tidak adanya Pendapatan Asli Desa (PAD) yang seharusnya bisa menjadi sumber keuangan desa selain anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Faktor Penghambat Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

a. Kebijakan Daerah

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi sumber utama keuangan desa tidak selalu tepat waktu dalam mengucurkan anggarannya,. Hal ini karena diharuskan menunggu keluarnya sebuah kebijakan yang mengatur mengenai anggaran tersebut. Keterlambatan ini menjadi faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan desa Muara Bengkal Ulu.

b. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa menyebabkan mereka tidak ikut dalam partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi kepada mereka.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai pelengkap penelitian perencanaan pembangunan desa di desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

1. Hasil temuan penulis bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di desa Muara Bengkal Ulu rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah desa. Oleh karena itu pemerintah desa dalam hal ini agar bisa melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, seperti: Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Sifat apatis masyarakat selama ini terjadi karena minimnya pengetahuan tentang hal tersebut. Selanjutnya mungkin bisa melaksanakan dan memperbaiki komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa karena masyarakat merasa tidak pernah di ikutlibatkan di dalamnya oleh karena komunikasi yang kurang.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menemukan bahwa pemerintah desa Muara Bengkal Ulu perlu mengoptimalkan masyarakat yang hadir pada kegiatan perencanaan khususnya pada kegiatan Musrenbangdes. Pada hal ini yang dimaksudkan ialah walaupun secara kuantitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Muara Bengkal Ulu rendah, akan tetapi diharapkan untuk dimaksimalkan sehingga menghasilkan sebuah kualitas. Kualitas yang dimaksud ialah hasil akhir atau output sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan atau visi misi yang telah disepakati bersama..

Daftar Pustaka

- Afiffudin 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung : Alfabeta
- Alexander Abe, 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pembaharuan
- Bintoro Tjokroamidjojo, 2004, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, 2003, Paradigma-paradigma Pembangunan: Dan saling hubungannya dengan model, strategi, dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, Jakarta.
- Mustopadidjaja, 2014, BAPPENAS: Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia, Jakarta: LAN dan Duta Pertiwi.
- Nurman, 2015, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Perencanaan Pembangunan Jangla Menengah Desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutim